



## PUTUSAN

Nomor 2487/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 2487/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/xx/VI/2013;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Psenggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (L) umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah per ekonomian;
  - b. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tangerang makamohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;

*Hal.2 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksacq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat(L) umur 3 tahun Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat(L) umur 3 tahun Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

*Hal.3 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 2487/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 19 Juli 2017 dan tanggal 07 Agustus 2017, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 15 Agustus 2017 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 36031861xxxxxx, tanggal 18 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxx/xx/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal.4 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tangerang, tertanggal 03 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, nomor AL. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang, tertanggal 06 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 31 Juli 2017, (bukti P.4);

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri dan setelah menikah tinggal di Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tangerang
  - bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat(L) umur 3 tahun dan saat ini ikut Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat selama ini mampu dan bertanggung jawab dalam mengasuh, merawat dan mendidik anaknya, dan tidak berkelakuan tercela;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal.5 dari 16 hal. Put. No :248/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



- bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan, Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
  - bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2017 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
  - bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman kantor Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri dan setelah menikah tinggal di Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat(L) umur 3 tahun ;
  - Bahwa Penggugat selama ini mampu dan bertanggung jawab dalam mengasuh, merawat dan mendidik anaknya, dan tidak berkelakuan tercela;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah

*Hal.6 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



keuangan, dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;

- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2017 dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil,

*Hal.7 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi kartu tanda penduduk (P.1), Fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2) dan Fotokopi Surat Pernyataan Bersama (bukti P.3) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHP data jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2013 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan

*Hal.8 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah per ekonomian, Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing tetangga dan teman kantor Penggugat), yang keduanya telah

*Hal.9 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan, Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Januari 2017 dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah ranjang setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah,

*Hal.10 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

## فاذا ثبت دعوها لمدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Hal.11 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pengasuhan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Anak Penggugat dan Tergugat , umur 3 tahun, karena masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat diperkuat bukti P.3 dan P.4 dan keterangan Para saksi, maka terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan masih belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, kesemuanya menyatakan bahwa Penggugat mampu dan amanah untuk mengasuh anak-anaknya, dan juga saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka didasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai

*Hal.12 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



pemegang hak hadhanah kedua orang anak tersebut patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun 5 bulan, sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, hal mana tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ayahnya (Tergugat) dalam hal menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, sehingga Penggugat dilarang untuk tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk/mengunjungi bahkan ikut merawat, mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan bersama (bukti P.4), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan diserahkan langsung melalui Penggugat, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

*Hal.13 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun 5 bulan kepada Penggugat sampai anak mumayyiz ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pegasuhan anak tersebut setiap bulannya melalui Penggugat minimal sejumlah Rp.

*Hal.14 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Dzulqa'dah 1438** Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. HASAN HARIRI

Hakim Anggota,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

*Hal.15 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.*



Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 hal. Put. No :2487/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)